

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PARA PENGGUNA KARTU
ELEKTRONIK (E-MONEY) DI KOTA MAKASSAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

Nur Amira Azis

NIM: 10200115017

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Amira Azis
NIM : 10200115017
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkajene, 14 Agustus 1997
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jalan Pelelangan Ikan Tekolabbua
Judul : Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna
Kartu Elektronik (*E-Money*) Di Kota Makassar
Dalam Perpektif Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna Kartu Elektronik (*E-Money*) Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam”** benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 25 Juli 2019

Penyusun,

Nur Amira Azis
NIM. 10200115017

PENGESAHAN SKRIPSI

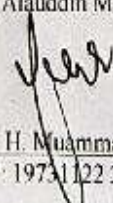
Skrripsi yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna Kartu Elektronik (E-Money) Dikota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam*" yang disusun oleh saudara Nur Amira Azis, NIM:10200115017, Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang munaqasyah yang di selenggarakan pada hari selasa, tanggal 6 Agustus 2019 M bertepatan dengan 5 Dzulhijjah 1440 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, Selasa 6 Agustus 2019

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|--------------------------------|---------|
| Ketua | : Prof. Dr. Darussalam, M. Ag | (.....) |
| Sekretaris | : Dr Nila Sastrawati, M.Si | (.....) |
| Pembimbing I | : Prof. Dr. Usman, M. Ag | (.....) |
| Pembimbing II | : Dr. Alimuddin, S. Ag., M. Ag | (.....) |
| Penguji I | : Dr. Kurniati, S. Ag., M. Pd | (.....) |
| Penguji II | : Dr. Rahmiati, M. Pd | (.....) |

Diketahui oleh,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Alauddin Makassar


Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc M. Ag
NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk kepada seluruh hamba-Nya. Atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis diberikan keteguhan hati dan jiwa semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang senantiasa membawa ajaran Islam dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan, semata-mata agar umatnya berada pada jalan kebenaran. Semoga keberkahan dan keselamatan juga senantiasa diberikan kepada keluarganya, para sahabat, sampai kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama Islam.

Berkaitan dengan selesainya penulisan skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna Kartu Elektronik (*E-Money*) Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam”**, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Ayahanda **ABD, Azis, D** dan Ibunda **Jamila, S.Pd** yang tidak hentinya memberikan vitamin ilmu, norma, dan nilai-nilai kehidupan, serta motivasi untuk menjadi mahasiswa yang produktif dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sosok yang senantiasa mendidik, membimbing, dan mengayomi anak-anaknya untuk terus mengasah dan meningkatkan potensi yang

dimiliki. Mudah-mudahan Allah swt. senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan kepada mereka.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh stafnya yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk membaca, menulis, dan meminjam buku-buku di perpustakaan.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si dan Ibu Dr. Kurniati, M.HI, selaku Ketua Jurusan dan Wakil Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. H. Usman Jafar, M.Ag dan Ibu Dr. Alimuddin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan, metodologi, dan integrasi keilmuan sejak awal sampai akhir penyelesaian skripsi
6. Ibu Dr. Kurniati, S.Ag., M.Pd dan Ibu Rahmiati, M.Pd, selaku Dosen Penguji I dan II yang senantiasa memberikan pendapat, saran, dan kritik dalam menjadikan skripsi ini lebih bermutu, bernilai ilmu, dan memiliki integrasi keilmuan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, baik secara formal

maupun nonformal, yang tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman sekelas saya, yang sejak awal duduk di bangku perkuliahan sampai akhir studi, senantiasa memberikan semangat, saling percaya satu sama lain, belajar bersama, saling membantu, dan memberikan arti kehidupan sebagai seorang mahasiswa.
9. Seluruh teman-teman angkatan saya, yaitu angkatan 2015 yang sering disebut Angkatan Somasi. Mereka senantiasa menjadi mitra dalam mencari dan menerima informasi seputar informasi kampus, komunikasi dengan birokrasi, sampai kepada hal-hal eksternal yang berkaitan dengan masa studi.
10. Teman-teman KKN Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone, khususnya teman-teman posko Desa Bonto Masunggu, yang senantiasa memberikan arti sebuah kekeluargaan dan kerja nyata di masyarakat. Meskipun hanya berbekal 45 hari, namun suka duka dalam mengabdikan di masyarakat dirasakan bersama, hingga terwujud harapan yang ditargetkan sebelumnya.
11. Teman-teman KKL Ilmu Falak yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan studi.
12. Teman-teman PPL Peradilan yang senantiasa dapat bekerjasama, serta membangun komunikasi yang baik.
13. Zulfidah, Fitriani, Eka Astuti Ningsih, Salmiah, dan A.Sry Suetina (Ai) sebagai teman seperjuangan di lingkup akademik, sekaligus menjadi saudara dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.
14. Rahyuni halim, yang senantiasa selalu menemani dalam pembuatan skripsi ini sekaligus teman dan saudara didalam maupun diluar kampus.

15. Nur Hikmah, Nurfaidah S.Pd, Muhammad Luqman Azis, S.Pd, Nur Azira Azis, dan Innayah Azis sebagai kakak dan adik saya yang senantiasa menjadi penyemangat, baik yang berkaitan dengan akademik maupun aktivitas sehari-hari. Semoga kita berenam senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilancarkan segala urusannya.
16. Terima kasih kepada orang-orang yang tidak sempat dituliskan namanya dalam halaman ini. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya, khususnya dalam penyelesaian skripsi hingga mendapatkan gelar yang saya cita-citakan. Dukungan, semangat, dan doa kalian sangat berarti. Mudah-mudahan Allah swt. menjadikannya sebagai ibadah dan amalan kepada kita semua.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen, terutama dalam peningkatan literasi di Indonesia. Penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kesalahan baik secara substansi maupun metodologi. Olehnya itu, besar harapan penulis kepada seluruh pembaca agar memberikan pendapat, saran, dan kritik yang membangun terkait dengan skripsi ini, sebagai acuan penulis untuk berkarya lebih baik lagi kedepannya.

Samata, Juli 2019

Penyusun

Nur Amira Azis

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| ABSTRAK | xviii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1-14 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Kajian pustaka | 11 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 13 |
| BAB II | |
| TINJAUAN TEORITIS | 15-28 |
| A. Pengertian Konsumen..... | 15 |
| B. Sejarah perlindungan konsumen | 15 |
| C. Hak dan kewajiban konsumen..... | 19 |
| D. Pengertian uang elektronik | 22 |
| E. Pihak-pihak dalam transaksi elektronik | 23 |
| F. Bentuk-bentuk perlindungan bagi pemegang kartu elektronik | 26 |

| | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN..... | 28-33 |
| | A. Jenis dan lokasi penelitian | 28 |
| | B. Pendekatan penelitian | 28 |
| | C. Sumber data/sampel sumber data | 29 |
| | D. Metode pengumpulan data | 30 |
| | E. Instrument penelitian | 31 |
| | F. Teknik pengolahan dan analisis data..... | 33 |
| | G. Pengujian keabsahan data..... | 33 |
| BAB IV | PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PARA PENGGUNA KARTU ELEKTRONIK (E-MONEY) DI KOTA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | 34-55 |
| | A. Gambaran Umum Penelitian | 34 |
| | B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Kartu Elektronik Di kota Makassar..... | 36 |
| | C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Kota Makassar..... | 44 |
| | D. Persepsi Masyarakat Terhadap Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Kartu Elektronik Di kota Makassar..... | 49 |
| BAB V | PENUTUP..... | 56-57 |

| | |
|---------------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 56 |
| B. Implikasi..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| LAMPIRAN | 61 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 79 |



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | ẓai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa | F | Ef |

| | | | |
|----|--------|---|---------|
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| هـ | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | , | Apostof |
| ي | ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathāh</i> | a | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | i | I |
| اُ | <i>ḍammah</i> | u | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِي | <i>fathāh dan yā’</i> | ai | a dan i |

| | | | |
|------|------------------------------|----|---------|
| نَوْ | <i>fathah</i> dan <i>wau</i> | au | a dan u |
|------|------------------------------|----|---------|

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ... ا... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ى | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| و | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجِّنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نَعَم : *nu''ima*
 عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَى : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan, 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh billāh

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.



ABSTRAK

Nama : Nur Amira Azis
NIM : 10200115017
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
**Judul : Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna
Kartu Elektronik (E-Money) Di Kota Makassar Dalam
Perspektif Hukum Islam**

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu elektronik (E-Money), 2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen di kota Makassar, dan 3) Persepsi masyarakat kota Makassar terhadap perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu elektronik di Makassar.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis-formal, dan teologis-normatif, dan pendekatan sosiologis, dan data dari penelitian ini berasal dari wawancara dan beberapa referensi-referensi buku, jurnal, internet yang sesuai dengan judul penelitian ataupun sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) adanya perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu elektronik yang diberikan oleh pihak penyedia jasa ini terbukti dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh bank Indonesia dengan maksimal saldo dalam kartu itu sebanyak dua juta rupiah dan system teknologi yang diaplikasikan oleh penyedia jasa yang disebut teknologi "*double do not*", 2) faktor pendukung dari perlindungan konsumen yaitu adanya Undang-Undang tentang perlindungan konsumen serta adanya wadah yang diberikan oleh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu jalur pengadilan serta adanya lembaga yang dinamakan BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen), namun yang jadi penghambat mengenai perlindungan konsumen ini kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak yang terkait sehingga banyak konsumen yang dirampas haknya serta dirugikan tidak mengetahui tentang penyelesaian sengketa konsumen, serta adanya kebiasaan masyarakat yang ketika ada produk-produk baru tidak ingin mencari tahu tentang dampak negatif dari produk tersebut, 3) kemudian persepsi masyarakat tentang perlindungan konsumen untuk kartu elektronik sudah cukup efektif karena manfaat dari kartu elektronik tersebut yang praktis dapat memudahkan kegiatan masyarakat sehari-hari, kemudian dalam hal keamanan yang perlu ditingkatkan sehingga dalam melakukan transaksi bisa nyaman dan aman.

Implikasi atau tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu untuk lebih melakukan kontrol ataupun pengawasan terkait produsen atau pihak penyedia jasa yang apabila mengeluarkan produk baru serta memperketat system jalannya hukum yang adil bagi masyarakat yang benar-benar dirampas haknya dan dirugikan, serta pihak penyedia jasa lebih memperhatikan kualitas produknya agar tercapai kemashalatan bersama, pejabat pemerintah harus senantiasa berpegang teguh pada asas legalitas, sebagai prinsip yang fundamental dalam kehidupan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi, maupun perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi di negara kita, khususnya adalah permasalahan mengenai perlindungan konsumen didalam berbagai bidang yang telah menghasilkan berbagai variasi barang ataupun jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak arus transaksi barang ataupun jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi baik berupa produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak memang cenderung menguntungkan bagi konsumen, hal tersebut dikarenakan kebutuhan konsumen akan barang dan ataupun jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan mereka untuk dapat memilih berbagai macam jenis produk barang ataupun jasa yang berkualitas sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah, karena sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan melalui iklan di media cetak maupun media online, serta penerapan perjanjian standar yang terkadang cenderung sangat merugikan

konsumen didalam menawarkan serta memperdagangkan produk barang dan atau jasa.

Oleh karena itu, berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen, maka seluruh permasalahan maupun kasus-kasus mengenai sengketa konsumen penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui jalur *litigasi* (pengadilan), ataupun *non litigasi* (penyelesaian sengketa diluar pengadilan), sebagaimana terdapat didalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen yang harus dilindungi oleh undang-undang tersebut. Adanya undang-undang perlindungan konsumen atau yang sering disebut UUPK dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) untuk dapat melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan maupun pendidikan terhadap para konsumen.¹ Upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan konsumen ini sangat penting karena bukan hal yang mudah untuk mengharapkan kesadaran dari para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara *variatif*.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan

¹Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2015),h.1-2.

beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.²

Perlindungan konsumen merupakan *konsekuensi* dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, dimana konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula (*Massconsumer Consumption*). Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit, dimana konsumen tidak mengenal siapa produsennya, demikian pula sebaliknya, bahkan produsen tersebut berada di negara lain.

Friedman dalam bukunya Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan : *“in terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost,”* dan dalam hubungan ini friedman juga menyatakan bahwa *“every function of law, general or specific, is allocative.”*³

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), h.1.

³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.26.

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Menurut Bellefroid dalam bukunya Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengatakan secara umum hubungan-hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat dilandaskan pada prinsip-prinsip atau asas kebebasan, persamaan dan solidaritas. Dengan prinsip atau asas kebebasan, subyek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka didalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus survival bagi manusia. Melalui prinsip atau asas solidaritas dikembangkan kemungkinan negara mencampuri urusan yang sebenarnya bersifat privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama.⁴

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan telah terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran. Hubungan hukum antara konsumen dan produsen telah mengalami perubahan konstruksi hukum, yakni hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* berubah menjadi *caveat venditor*.⁵

Dalam perkembangan pembayaran non tunai, dewasa ini di berbagai negara terlihat bahwa alat/instrumen pembayaran mikro juga telah berkembang cukup

⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.28-29.

⁵Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), h.4.

pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrument pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang sangat kecil namun volume yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif sangat cepat. Adanya peluang bagi lembaga non bank untuk dapat menjadi penerbit alat pembayaran mikro akan membuka kesempatan kepada masyarakat luas, meskipun bukan nasabah bank, untuk dapat menggunakan fasilitas pembayaran mikro. Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan akses masyarakat terhadap alat pembayaran non tunai.⁶

Kartu elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah ada sebelumnya seperti : *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit, dan kartu debit/ATM, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu elektronik tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan rekening nasabah di bank), sebab kartu elektronik tersebut merupakan produk '*stored value*' dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).⁷

Perkembangan alat pembayaran berupa uang elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar tidak hanya diterbitkan dalam bentuk kartu namun juga telah berkembang dalam bentuk lainnya sehingga pada tahun 2009 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang

⁶Ahmad Hidayat, dkk, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Dalam *Jurnal Bank Indonesia*, h.4, Di akses pada tanggal 29 Mei 2018 14:29.

⁷Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Dalam *jurnal wawasan hukum*, Vol.29, h.896-897, di akses pada tanggal 29 Mei 2018 14:42

uang elektronik peraturan bank Indonesia tentang uang elektronik ini memuat pengaturan antara lain mengenai tata cara perizinan dan peralihan perizinin, tata cara penyelenggaraan, pengawasan, peningkatan keamanan teknologi dan sanksi, meskipun relatif dalam tahap perkembangan, penggunaan *e-money* sebagai salah satu alternatif alat pembayaran non tunai memberi manfaat dan kelebihan dibanding alat pembayaran tunai, oleh karena itu, *e-money* mempunyai potensi dalam menggeser peran uang tunai untuk pembayaran-pembayaran yang bernilai kecil (*retail*) sebab transaksi dengan nilai kecil tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah baik bagi konsumen maupun pedagang (*merchant*). Meskipun manfaat dari penggunaan tidak dapat terbantahkan, namun dalam praktik sebagaimana terjadi pada hal-hal yang baru, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan uang elektronik.

Dengan ketentuan umum ketentuan hukum tersebut diharapkan dapat memberdayakan konsumen pemegang uang elektronik dan meningkatkan kesadaran para penerbit agar kepentingan konsumen dapat dilindungi baik secara integratif maupun komprehensif serta dapat diterapkan secara langsung dimasyarakat. Perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.⁸

Dalam Islam, pengaturan tentang konsumen mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah swt. Setiap pergerakannya dalam mengonsumsi barang dan jasa adalah manifestasi zikir atas nama Allah. Batasan-batasan yang diberikan islam kepada konsumen untuk tidak mengonsumsi barang dan jasa yang haram, agar konsumen selamat baik di dunia maupun di akhirat.

⁸Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Dalam jurnal wawasan hukum, Vol.29, h.898, Di akses pada tanggal 29 mei 2018 15:35.

Konsumen dalam ekonomi islam tidak semata-mata hanya untuk mengonsumsi kebendaan yang didasarkan pada rasionalisme semata, tetapi juga konsumen untuk kerohanian, sosial, dan lingkungan. Allah swt., memerintahkan kepada umatnya, dalam hal ini konsumen, untuk mengonsumsi makanan yang baik, halal, dan bermanfaat bagi manusia,⁹ juga memanfaatkan segala anugerah-Nya¹⁰ sebagai wujud ketaatan padanya.¹¹ Produk haram dengan label halal yang beredar dimasyarakat akan mempunyai dampak negatif, tidak hanya berpengaruh pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman erat sekali kaitannya dengan ibadah. Dikatakan berpengaruh kepada perusahaan itu sendiri karena menimbulkan ketidakpercayaan publik akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap produk perusahaan tersebut. Hilangnya kepercayaan public akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap perusahaan, yang secara bersamaan akan menurunkan daya produktifitas perusahaan tersebut.¹²

Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Perlindungan konsumen muslim sangat penting di Indonesia, karena mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam. Maka sudah selayaknya konsumen muslim tersebut mendapatkan perlindungan atas barang dan jasa sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi lain, pemerintah Indonesia juga dituntut untuk

⁹QS.Al-Baqarah/2:172; QS.Al-Maidah/5:4-5; QS An-Nahl/16: 114; QS.Al-Mu'minuun/23: 51.

¹⁰QS. Al-A'raf/7: 32.

¹¹QS. Al-Baqarah/2: 35; QS. Al-Baqarah/2: 168.

¹²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), h.8.

melaksanakan upaya aktif guna melindungi konsumen muslim yang merupakan hak warga negara yang beragama Islam di Indonesia.

Dalam ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu: prinsip kebenaran, kebersihan, kesederhanaan, kemaslahatan, dan moralitas.

Prinsip kebenaran, prinsip ini mengatur agar konsumen untuk menggunakan barang dan jasa yang dihalalkan oleh Islam, baik dari segi zat, proses produksi, distribusi, hingga tujuan mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam barang dan jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksinya dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'.

Prinsip kebersihan, bahwa konsumen berdasarkan ajaran Islam harus mengonsumsi barang dan jasa yang bersih, baik, tidak kotor atau menjijikan, serta tidak bercampur dengan najis, karena barang dan jasa yang haram, kotor, dan bernajis membawa kemudharatan duniawi dan ukhrawi.

Prinsip kesederhanaan, Islam memberikan standarisasi bagi konsumen untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi barang dan jasa, serta mampu mengekang hawa nafsu dari pemborosan dan keinginan yang berlebihan. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada konsumen untuk menjaga keseimbangan, tidak terlalu kikir dan tidak terlalu berlebihan dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Prinsip kemashalatan, bahwa Islam membolehkan konsumen untuk menggunakan barang dan jasa selama barang dan jasa tersebut memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Disamping itu, Islam juga membolehkan konsumen untuk mengonsumsi barang dan jasa yang haram jika dalam keadaan tertentu (darurat) atau kondisi terpaksa, selama tidak berlebihan dan tidak melampaui batas.

Prinsip moralitas dan akhlak, seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah melakukan sesuatu. Islam mengajarkan agar konsumen memenuhi etika, kesopanan, bersyukur, zikir, dan pikir, serta mengesampingkan sifat-sifat tercela dalam mengonsumsi barang dan jasa.¹³

Dalam uraian diatas sangat penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “*Perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu elektronik (E-Money) di kota Makassar dalam perspektif hukum Islam*”. Penelitian ini sangat penting agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum secara jelas tentang adanya transaksi menggunakan non tunai karena dengan adanya pembayaran dengan non tunai ini akan ada dampak yang mungkin bisa saja terjadi.

B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

- a. Perlindungan Konsumen
- b. Kartu Elektronik (*E-Money*)
- c. Hukum Islam

2. Deskripsi Fokus

- a. Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 1 bahwasanya “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
- b. Kartu Elektronik (*E-Money*) adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Pada umumnya, transaksi ini menggunakan jaringan computer seperti internet dan penyimpanan harga digital.

¹³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), h.10-11.

- c. Hukum Islam adalah kata *Syara'* yang secara etimologi berarti “jalan-jalan yang bisa ditempuh air”. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju jalan Allah. Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

| Fokus Penelitian | Deskripsi Fokus |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Konsumen | Pengertian konsumen, sejarah perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, serta kewajiban konsumen |
| Kartu Elektronik (E-Money) | Upaya hukum bagi pemegang kartu elektronik dalam melakukan transaksi uang elektronik. |
| Hukum Islam | Dasar-dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits terkait perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu elektronik. |

C. *Rumusan Masalah*

Adapun pokok masalah dari judul penelitian ini yakni bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu elektronik (*E-Money*) di Kota Makassar dalam perspektif hukum Islam?

Dari pokok masalah tersebut dapat diketahui apa saja yang menjadi sub masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu elektronik (*E-Money*)?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen di kota Makassar?
3. Bagaimana persepsi masyarakat kota Makassar terhadap perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu elektronik di Makassar?

D. Kajian dan Penelitian Terdahulu

1. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Adapun isi dari buku ini menjelaskan pada bab 1 dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen seperti aturan-aturannya dan sanksi-sanksinya, kemudian dibab 2 mengenai asas dan tujuan, bab 3 mengenai hak dan kewajiban, bab 4 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan beberapa bab menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, badan perlindungan konsumen nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa konsumen, penyidikan, sanksi, dan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Adapun komentar pembeda dari buku ini yakni dalam buku ini masih belum lengkap menjelaskan keseluruhan tentang kode etik untuk pengusaha agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2. Dr .Zulham, S.H.I, M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, adapun isi dari buku ini menjelaskan mengenai sejarah perlindungan konsumen, konsumen dan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, sertifikasi dan labelisasi produk halal, serta badan dan lembaga perlindungan konsumen. Adapun komentar pembeda dari buku ini dimana mengenai perlindungan konsumen dalam Islam belum dijelaskan secara terperinci tetapi buku ini memuat mengenai bagaimana Islam menjadi agama yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan segala sesuatunya tentunya dalam hal

produksi dan konsumsi, dan buku ini memiliki edisi revisi yang merupakan penyempurna dari buku ini.

3. Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen edisi revisi, dalam buku ini penyempurna dari buku sebelumnya, dan buku ini memiliki kata pengantar yang disampaikan oleh wakil ketua badan perlindungan konsumen nasional yakni Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H.

4. Prof.Dr.A.Muri Yusuf, M.pd, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Adapun isi dari buku ini menjelaskan tentang manusia, ilmu, dan konsep dasar penelitian, dan menjelaskan mengenai metode-metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, serta penelitian gabungan, dan kebetulan jenis penelitian yang penulis gunakan yakni mengenai penelitian kualitatif atau penelitian lapangan.

5. Mustafa Edwin Nasution,dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, dalam buku ini menjelaskan bagaimana sistem ekonomi pada Islam, aturan-aturan permainan dalam ekonomi Islam, serta membandingkan sistem ekonomi Islam dan konvensional, permintaan dan penawaran dalam Islam, serta bagaimana teori produksi dan bagaimana Islam memandang dalam produksi.

6. Linda Nur Hasanah, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai, dalam skripsi ini menjelaskan mengenai alat pembayaran, bagaimana konsep uang, serta pihak-pihak dalam transaksi elektronik, kemudian menjelaskan mengenai jual beli, rukun jual beli, dan syarat-syarat jual beli, serta menjelaskan mengenai perlindungan konsumen pengguna kartu elektronik, dan bagaimana kedudukan hukum dari uang elektronik dalam hal melakukan transaksi pembayaran.

Adapun komentar pembeda dari kajian serta penelitian terdahulu yang dikaji oleh kelompok ataupun perorangan yang telah dipaparkan diatas yaitu tidak ada

satupun dari penelitian tersebut yang membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu elektronik (*E-Money*) dalam perpektif Islam, namun tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian terdahulu serta kajian pustaka tersebut membahas ataupun menyinggung tentang perlindungan konsumen namun berbeda dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Tujuan umum penelitian

Untuk mengetahui serta memahami mengenai bagaimana pelaksanaan serta bagaimana perlindungan konsumen bagi para pemegang kartu elektronik tersebut sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi.

b. Tujuan khusus penelitian

- 1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
- 2) Untuk menemukan dan mengetahui faktor-faktor apa saja sehingga pelaksanaan perlindungan konsumen di Kota Makassar masih memiliki hambatan.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu elektronik dikota Makassar.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Kita dapat mengetahui tentang bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan terhadap pengguna kartu elektronik (*e-money*).

b. Kegunaan praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar pemerintah bisa memberikan perlindungan terhadap para pengguna kartu elektronik .



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pengertian Konsumen*

Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri ataupun keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.¹

Dikemukakan pula pengertian konsumen yang khusus berkaitan dengan masalah ganti kerugian. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.

B. *Sejarah Perlindungan Konsumen*

Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, kendatipun sebagian besar peraturan-peraturan tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku lagi.

Dalam beberapa kitab undang-undang juga terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen, yaitu :

1. KUH Perdata: bagian 2, bab V, buku II mengatur tentang kewajiban penjual dan perjanjian jual beli

¹Linda Nur Hasanah, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam), *Skripsi*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h.49.

2. KUHD: tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan sebagainya.
3. KUH Pidana: tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merk, persaingan curang, dan sebagainya.¹

Hiruk pikuk gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an, yakni dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (*Nongovernmental Organization*)² Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada bulan Mei 1973. Organisasi ini pertama kalinya dipimpin oleh Lasmijah Hardi. Organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, tentu saja dalam aktivitasnya bertindak selaku perwakilan konsumen (*Consumer Representation*) yang bertujuan untuk melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.³

Selanjutnya, pergerakan pemberdayaan konsumen semakin gencar, baik melalui ceramah, seminar, tulisan, dan media massa. Gerakan konsumen di Indonesia, termasuk yang di prakarsai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR, yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada tanggal 20 april 1999.

Dilain pihak, faktor yang juga turut mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah perkembangan system perdagangan global yang dikemas dalam kerangka World Trade Organization (WTO), maupun program Internatioanl Monetary Fund (IMF), dan program bank dunia. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian perdagangan dunia

¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), h.32.

²Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.7.

³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), h.34.

diikuti dengan dorongan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional dibidang perdagangan.⁴

Sebelum Islam datang, Mekkah telah menjadi pusat perhatian seluruh kabilah Jazirah Arab karena adanya Ka'bah, dan suku Quraisy yang berdomisili di Mekkah dikenal dengan sebagai penjaga Ka'bah yang merupakan tempat suci bagi bangsa Arab. Suku Quraisy mendapat keuntungan besar atas status mereka sebagai pemelihara Ka'bah, terutama dalam hal perdagangan.⁵

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam telah dimulai pada saat Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasulullah) membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan ataupun upah. Kendatipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan Rasulullah, namun kita dapat menemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah.⁶

Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Karena kejujurannya dan prestasinya tersebut, Rasulullah berhasil menjual barang dagangan Khadijah dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya.⁷

Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, konsumen juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak menzalimi

⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), H.37.

⁵Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h.47.

⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), h.40.

⁷Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h.72.

dan tidak pula dizalimi. Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah (2): 279 yang berbunyi :

وَلَا تَظْلِمُونَ ۚ لَا أَمْوَالَكُمْ رُءُوسُ فَلَكُمْ تُبْتِغُونَ ۚ وَإِنْ رُسُولُهُ ۖ أَلَّا تَفْعَلُوا ۖ لَمَ فَعِلَ ۚ
تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁸

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Diakhir ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan/atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen dan produsen.

Praktik-praktik perdagangan yang dilarang Rasulullah pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah di antaranya :

1. Talaqqi Rukban
2. Gisyah
3. Perdagangan najasy
4. Produk haram
5. Riba
6. Tathfif

⁸Kementerian agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Halim Publishing dan distributng, 2013) h.47

Dari sejumlah praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Meskipun di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya uang kertas ataupun uang elektronik dan tidak ada dasar hukum yang mengatur baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadits. Dinar emas dan dirham perak serta uang bentuk *fulus* merupakan mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah saw. Dasar mata uang tersebut terus digunakan hingga muncul uang kertas (*paper money*). Dalam hadits riwayat muslim dijelaskan :

“jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, karena dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayara kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR.Muslim no.1587)”⁹

Uraian diatas membuktikan, bahwa sebelum barat dan dunia modern mengenal pengaturan perlindungan konsumen, Islam telah menjalankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Namun pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada masa Rasulullah tersebut belum terperinci secara empiris, karena keterbatasan teknologi pada saat itu. Kendatipun demikian, Rasulullah telah berhasil meletakkan dasar-dasar perlindungan konsumen akhirnya diadopsi oleh dunia modern sekarang.

C. Hak dan Kewajiban Konsumen

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut :¹⁰

⁹Linda Nur Hasanah, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam), *Skripsi*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h.68.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur, dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.¹¹
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban untuk¹²

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.

¹¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi* (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), h.50-51.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan perlindungan konsumen secara empiris saat ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, namun pengaturan perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangat mendasar, sehingga pengaturan tersebut menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan konsumen modern.

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya sebagai berikut :

1. *Khiyar Majelis*

Khiyar merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan kabul antara antara produsen dan konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki *khiyar* selama jangka waktu yang jelas.

3. *Khiyar aibi*

Khiyar Aibi adalah haram bagi seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen).

4. *Khiyar Tadlis*

Yaitu, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya.

5. *Khiyar Al-Ghabn Al-Fahisy (Khiyar Al-Mustarsil)*

Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa menjadi hak pembeli.

6. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli.

7. *Khiyar Ta'yn*

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.¹³

D. *Pengertian Uang elektronik (E-Money)*

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat melakukan pembelian barang dan jasa. Sedangkan uang dalam Islam berasal dari bahasa arab disebut "*Maal*" asal katanya berarti condong yang berarti menyondongkan ke arah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya penarik yang terbuat dari logam misalnya tembaga-tembaga, emas, dan perak.

¹³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), h.58-62.

Secara umum, uang elektronik atau dalam Bahasa Inggris *Electronic Money*, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital di sebuah computer atau *Micro Chip* dalam sebuah kartu.

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*, transaksi elektronik menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁴

E. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Elektronik

Sesuai dengan peraturan bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi elektronik antara lain :

a. Prinsipal

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

b. Penerbit

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Bank atau lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai penerbit uang elektronik wajib memperoleh izin dari bank Indonesia.

c. Acquirer

¹⁴Linda Nur Hasanah, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam), *Skripsi*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h.32-33.

Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

d. Pemegang

Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Pemegang adalah konsumen, dimana pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan konsumen merupakan setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵

e. Pedagang

Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pedagang.¹⁶

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.¹⁷

Perihal dalam Al-Qur'an dua logam mulia ini, emas, dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam QS. At-Taubah ayat 34 disebutkan :

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik.

¹⁷Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h.242.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih.

Al-kasani memberi penjelasan argumen Muhammad berkata : “maksud keterangan sifat adalah dasar apa yang menjadi ukuran nilai kehartaan benda. Nilai kehartaan benda, sebagaimana diukur dengan dinar dan dirham juga diukur dengan *fulus* (uang lembaganya).¹⁹

Selain dirham, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah mengenal dinar, mata uang yang terbuat dari emas. Dinar dan dirham diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa diseputar Jazirah Arab. Para pedagang kalau pulang dari Syam, mereka membawa dinar emas Romawi dan Irak mereka membawa dirham perak Persia. Kadang-kadang mereka juga dirham himyar dari Yaman. Jadi pada masa itu sudah banyak mata uang asing

¹⁸Kementrian agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Halim Publishing dan distributng, 2013) h.192

¹⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h.4-5

yang masuk negeri Hijaz. Mata uang itu digunakan hingga runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pasca-perang dunia I.²⁰

F. Bentuk-Bentuk Perlindungan Bagi Pemegang Kartu Elektronik

Dalam hal hilangnya kartu (*Lost/Stolen Card*), kartu tetap dapat digunakan sampai pemilik sah memberitahukan kepada bank penerbit, namun kartu tersebut tetap dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Penyalahgunaan kartu oleh pihak lain dapat terjadi dengan pencurian oleh pihak lain maupun kelalaian dari pemilik kartu itu sendiri. Setelah kartu berada pada pihak lain, penyalahgunaan tentu saja dapat digunakan dengan berbagai cara, salah satunya seperti berbelanja langsung kepada *merchant*, karena ketika kartu hilang maka kartu dapat digunakan tanpa perlu dilakukan otoritas oleh *merchant* dan tidak dapat dilacak keberadaan kartu tersebut.

Tingkat sekuritas pada *e-money* merupakan salah satu aspek penting mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan baik bagi penerbit maupun pemegang kartu tersebut. Usaha kejahatan untuk menembus sistem *security e-money* bisa terjadi pada level pengguna, pedagang ataupun penerbit, termasuk pencurian terhadap peralatan milik *merchant* atau pemegang kartu, pemalsuan kartu atau pesan (*message*), merubah data yang tersimpan dalam kartu atau isi pesan yang dikirimkan, dan juga dapat dilakukan dengan merubah fungsi *software*.²¹

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, penerbit memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan bank Indonesia tentang uang elektronik yaitu :

²⁰Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h.245

²¹Nyi Nyoman Anita Candrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*, Dalam jurnal wawasan hukum, h.9, di akses pada tanggal 30 Juni 2018 11:12.

1. Menerbitkan uang elektronik sesuai dengan nilai uang yang disetorkan pemegang kepada penerbit.
2. Mematuhi batas maksimum nilai transaksi dan batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
3. Adanya penggantian atas pembaharuan terhadap keterbatasan usia teknis media uang elektronik dengan tidak menghilangkan nilai uang elektronik yang tersimpan karena merupakan milik pemegang kartu.
4. Penerbit mencatat setiap identitas pedagang (*merchant*).
5. Adanya penerapan manajemen resiko keuangan dan resiko operasional.
6. Penerbit menginformasikan secara tertulis mengenai produk uang elektronik kepada pemegang.
7. Uang elektronik wajib diterbitkan dalam mata uang rupiah.²²

Penerbit uang elektronik wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatannya dengan menyampaikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu. Kewajiban penyelenggara sistem pembayaran elektronik terhadap pemegang kartu uang elektronik didasarkan bahwa penyelenggara dan pemegang kartu kedudukannya tidak sejajar dan bahwa kepentingannya pemegang kartu *E-Money* sangat rentan terhadap tujuan penyelenggara yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh pemegang kartu.

²²Nyi Nyoman Anita Candrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*, Dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, H.10-11, di akses pada tanggal 30 Juni 2018 11:12.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang akan mengkaji tentang bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan kepada pemegang ataupun pengguna kartu elektronik dalam melakukan suatu transaksi.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota Makassar, Dan instansi-instansi yang berkaitan dengan penerbit jasa dari kartu elektronik (*E-Money*) seperti Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI. Dilihat dari gambaran diatas bahwasanya alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena daerah tersebut merupakan daerah yang berada dipertengahan kota Makassar, selain itu pula masyarakat disana utamanya dalam hal perekonomian dan perdagangan sangat signifikan kemajuannya, kemudian karena lokasi tersebut berada dipertengahan kota maka masyarakatnya juga banyak yang mengikuti perkembangan zaman utamanya dalam hal kartu elektronik tersebut.

B. *Pendekatan Penelitian*

1. Pendekatan yuridis formal (UU)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan menyangkut tentang beberapa kajian tentang hukum serta peraturan perundang-undangan khususnya UU yang membahas tentang perlindungan konsumen.

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menggunakan perangkat ilmu sosial dalam melihat serta menganalisa obyek. Dipilihnya pendekatan ini dikarenakan pada penelitian nanti itu akan menyangkut tentang masyarakat serta

akan melihat gejala-gejala sosial dalam menanggapi tentang keberadaan kartu elektronik ini di zaman modern ini.

C. *Sumber Data*

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu ataupun sekelompok orang maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, ataupun hasil pengujian data (benda). Adapun sumber data utama yang penulis gunakan ialah pengguna kartu elektronik atau biasa disebut dengan konsumen sebanyak 10 orang, kemudian pihak dari penyedia jasa sebanyak 2 orang, kemudian tokoh-tokoh masyarakat baik dari tokoh ulama seperti Muhammadiyah ataupun NU (Nahdatul Ulama), serta ketua RT/RW, untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel berikut:

| No. | Informan | Jumlah Informan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Pengguna Kartu Elektronik (Konsumen) | 10 Orang |
| 2. | Pihak Penyedia Jasa (Bank Penerbit) | 2 Orang |
| 3. | Tokoh Masyarakat seperti ulama/organisasi masyarakat (Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama), ataupun ketua RT/RW | 3 Orang |
| | Total | 15 Orang |

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan secara umum. kemudian sumber sekunder seperti pekerja historis yang ditulis dengan tangan.¹

Data sekunder ialah dengan melakukan penelitian kepada masyarakat pengguna kartu elektronik (*E-Money*) di Kota Makassar.

3. Catatan yang sedang berjalan

Catatan yang sedang berjalan adalah pengumpulan data pada saat penelitian sedang berlangsung.²

4. Pengumpulan kembali

Pengumpulan kembali perlu dilakukan apabila informasi dan data yang sudah terkumpul belum mampu menggambarkan fenomena yang menjadi tujuan dan fokus penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.³

2. Observasi

¹A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:PT.Fajar Interpratama Mandiri,2016), h.35

²A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:PT.Fajar Interpratama Mandiri,2016), h.350

³A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:PT.Fajar Interpratama Mandiri,2016), h.37

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi, observasi dapat dibedakan lagi dalam dua bentuk yaitu *Participant Observer* yakni suatu bentuk observasi dimana pengamat secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati, kemudian yang kedua *Non Participation Observer* yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat atau peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamatinya.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

E. *Instrument Penelitian*

1. Peneliti, peneliti disini berfungsi atau berperan sebagai orang yang mencari serta menggali seluruh informasi-informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi pengguna kartu elektronik.
2. Pedoman wawancara, wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data, bentuk wawancara yang digunakan dalam memberikan pertanyaan kepada informan yakni sesuai fakta ataupun pendapat dan bisa pula berupa pertanyaan ataupun pernyataan, adapun beberapa pertanyaan yang dilampirkan adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama, menanyakan mengenai identitas dari informan secara lengkap.
 - b. Kemudian yang kedua, menanyakan pendapatnya mengenai keberadaan dari kartu elektronik zaman modern ini.
 - c. menanyakan apakah si informan ini salah satu pengguna kartu elektronik sebagai alat untuk melakukan transaksi.

- d. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang keberadaan kartu elektronik di zaman modern ini
- e. Apa kelemahan dan keunggulan dari kartu elektronik ini dibandingkan alat transaksi yang manual?
- f. Apakah ibu/bapak ini pernah mengalami masalah pada kartu elektroniknya pada saat melakukan transaksi
- g. Bagaimana tindakan pemerintah kepada pelaku usaha dalam melakukan perlindungan konsumen bagi para perngguna jasa kartu elektronik ini ?
- h. Sejauh ini bagaimana perbandingan pengaturan antara kartu elektronik ini dengan alat transaksi manual yang bapak/ibu rasakan selama menggunakannya?
- i. Seiring dengan dicanangkannya kepada masyarakat Indonesia untuk beralih ke kartu elektronik ini (*E-Money*), bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal adanya timbal balik yang memberikan keuntungan bukan hanya penerbit tetapi juga pada masyarakat ?

3. Pedoman observasi, melakukan penelitian di salah satu instansi atau bank yang berkaitan dengan judul penelitian, dan kemudian mengumpulkan beberapa informan yang menggunakan kartu elektronik tersebut sebagai alat transaksi mereka, dan menanyakan beberapa hal terkait judul dari penelitian tersebut.

4. Kamera.
5. Tap recorder.
6. Alat tulis, buku dan penghapus.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Kategorisasi Data/Klasifikasi Data

Data primer yakni diambil dari penelitian lapangan yang menyangkut tentang perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu elektronik. Data sekunder yakni diambil dari beberapa referensi-referensi ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan tentang perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu elektronik.

2. Reduksi Data

- a. Staterpac
- b. non litigasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan)
- c. litigasi (pengadilan)

3. Editing Data

- a. Chip

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data melalui triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Dalam karya Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi dan membaginya dalam 4 hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

Triangulasi dapat berarti adanya informan-informan yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda mengenai sesuatu. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.⁴

⁴Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014) h.168

BAB IV

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU ELEKTRONIK DIKOTA MAKASSAR

A. *Setting Lokasi Penelitian*

1. Sejarah singkat Bank Mandiri

Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar disepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. Selain itu, Bank Mandiri mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak perusahaan utama yaitu Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan AXA Mandiri. Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari berbagai segmen merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan sektor usaha, nasabah Bank Mandiri bergerak dibidang usaha yang sangat beragam. Sebagai bagian dari upaya penerapan *prudential banking* dan *best-practices risk management*, Bank Mandiri telah melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan dengan *four-eye principle*, dimana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan *business unit*. Sebagai bagian diversifikasi risiko dan pendapatan, Bank Mandiri juga berhasil mencetak kemajuan yang signifikan dalam melayani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan nasabah ritel. Pada akhir 1999, porsi kredit kepada nasabah *corporate* masih sebesar 87% dari total kredit, sementara pada 31 Desember 2009, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro telah mencapai 42,22% dan porsi kredit kepada nasabah *consumer* sebesar 13,92%, sedangkan porsi kredit kepada nasabah *corporate* mencakup 43,86% dari total kredit. Sesudah menyelesaikan program transformasi semenjak

2005 sampai dengan tahun 2009, Bank Mandiri sedang bersiap melaksanakan transformasi tahap berikutnya dengan merevitalisasi visi dan misi untuk menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif.

2. Visi dan Misi Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar

Sebagai pedoman dalam mengelola usahanya, Direksi Bank Mandiri telah menetapkan Visi dan Misi Bank Mandiri yang wajib diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh setiap pegawai. Adapun visi dan misi Bank Mandiri ialah sebagai

Visi

Menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif

Misi

kami berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan, baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. Kami melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Kami ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia dan kerja sama tim yang terbaik, dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, kami mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan timbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham.

3. Struktur organisasi Bank Mandiri Kantor Cabang Kartini

Bank Mandiri cabang Makassar kartini, struktur organisasi dikepalai oleh pimpinan cabang kemudian kepada ke beberapa bagian divisi yang terdiri dari

CSO (*Customer Service Officer*), *head teller*, *verificator* dan yang terakhir adalah *security*.

B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Kartu Elektronik Di Kota Makassar

Peranan *e-money* sebagai salah satu bentuk pembayaran non tunai disamping memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemegang kartu juga memiliki berbagai potensi risiko keamanan. Potensi risiko yang dapat terjadi dalam pembayaran mikro antara lain adalah risiko pemalsuan dan duplikasi kartu, modifikasi data atau aplikasi *e-money*, pengubahan *message*, pencurian, penyangkalan (*repudiation*) dan risiko *malfunction*. Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat terjadi tersebut, Penyelenggaraan *e-money* harus diatur dalam mewujudkan kerangka hukum yang kuat dan transparan serta mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemegang kartu Penerbit uang elektronik (*e-money*).⁵

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, yang dimana kalau kita merujuk pada UU Perlindungan Konsumen dijelaskan didalamnya tentang bagaimana hak-hak konsumen tepatnya pada pasal 4 yaitu meliputi :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

⁵Z.Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia* (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.67

2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan hukum secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau pengganti apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁶

Sebelum hak dari konsumen dipenuhi, maka konsumen pun harus melaksanakan kewajiban yang telah diberikan oleh pelaku usaha, kewajiban tersebut juga terdapat pada UU perlindungan konsumen dalam pasal 5 UU perlindungan konsumen, adapun kewajiban konsumen yang diatur sebagai berikut :

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun ketentuan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) tahun 2009 no. 11/12 tentang uang elektronik bahwasanya penerbit diwajibkan menerapkan manajemen risiko operasional dan risiko keuangan dengan cara :

1. Menempatkan dana *float* dalam bentuk asset yang aman dan likuid.
2. Menggunakan dana *float* tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang dan pedagang, dan
3. Memenuhi kewajiban kepada pemegang dan pedagang secara tepat waktu.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang uang elektronik, lebih lanjut diatur dalam penyelenggaraan penerapan manajemen risiko operasional para penyelenggara kegiatan uang elektronik wajib meningkatkan keuangan teknologi uang elektronik untuk mengurangi tingkat kejahatan dan penyalahgunaan uang elektronik sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap uang elektronik sebagai alat pembayaran.⁷

Peningkatan keamanan tersebut dilakukan dengan penggunaan *proventechology* yang memenuhi aspek-aspek yaitu :

1. Adanya sistem keamanan teknologi yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Kerahasiaan data.
 - b. Integrasi system dan data.

⁷ Ivan Prasetyo, Penanggung Jawab Pertumbuhan Bisnis E-Channel, *Wawancara*, Makassar, 11 Juni 2019

- c. Otentikasi system dan data.
 - d. Pencegahan terjadinya pengangkalan transaksi yang telah dilakukan.
 - e. Ketersediaan system.
2. Adanya sistem dan prosedur untuk melakukan *audit trail*
 3. Adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan sumber daya manusia (SDM), dan
 4. Adanya *Bussines Contiuty Plan* (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan uang elektronik.

Dalam pembelian kartu *E-Money* pada penerbit, kartu akan dilengkapi dengan syarat dan ketentuan penggunaan kartu *E-Money* tersebut. Syarat dan ketentuan tersebut menjadi suatu bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu dalam penggunaannya pada transaksi *E-Money*.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata tepatnya pada pasal 1313 menjelaskan surat perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut pada pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat berupa syarat-syarat dan ketentuan dari penggunaan kartu *E-Money* secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-

undang dan perikatan ini berlaku bagi para pihak yang sepakat di dalam perjanjian tersebut.⁸

Terkait dengan perlindungan pemegang kartu *E-Money* sebagai konsumen uang elektronik, hal ini diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen yang secara garis besar telah memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk menikmati produk mereka secara jelas dan tidak menyesatkan, undang-undang perlindungan konsumen mengatur pelaku usaha perbankan untuk memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen berupa :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.⁹

Dalam UU perlindungan konsumen telah memberikan posisi tawar menawar yang lebih kuat terhadap pada pelaku usaha, namun berhubungan dengan pemegang kartu *E-Money* dalam system pembayaran elektronik (*E-Payment*) undang-undang perlindungan konsumen tidak mengatur secara jelas bagaimana menyelenggarakan sebuah sistem elektronik yang handal dan aman dalam

⁸R.Subekti Dan R.Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*,(Jakarta:PT.Pradnya Paramita, 1992) h.338

⁹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Adya Bakti, 2006) h.338

melindungi konsumen. Pengaturan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik ini diatur lebih lanjut pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Namun sehubungan dengan diberlakukannya peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 april 2009 tentang uang elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 65, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5001), dan dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan uang elektronik, maka dari itu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyelenggaraan uang elektronik dalam surat edaran Bank Indonesia, ini membuktikan bahwasanya dalam menggunakan uang elektronik lebih dijamin keamanan dan kelancaran dalam melakukan transaksi.

Perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan-ketentuan mengenai perikatan pada umumnya tersebut berlaku terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, tukar-menukar, penitipan barang. Bahkan ketentuan umum ini berlaku juga terhadap perjanjian yang timbul dalam praktik masyarakat yang belum dikenal dalam BW seperti perjanjian sewa-beli dan perjanjian arisan.¹⁰

Salah satu acuan yang penting pada undang-undang perlindungan konsumen yaitu dengan adanya peraturan mengenai pencantuman klausula baku pada perjanjian. Dimana dasar peraturan dalam penggunaan alat pembayaran elektronik menggunakan uang elektronik (*E-Money*) adalah dengan menggunakan sebuah perjanjian baku, maka pencantuman klausula baku yang seimbang haruslah diatur. Menurut penjelasan pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen, adanya

¹⁰Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Alauddin University Press, 2013) h.69.

peraturan pencantuman klausula baku bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Ivan selaku penanggung jawab dari pertumbuhan bisnis dalam kartu ATM, kartu debit, serta kartu *E-Money*, beliau mengatakan bahwasanya *E-Money* adalah uang elektronik yang berfungsi sebagai media pembayaran yang terdiri dari dua jenis yaitu dalam bentuk kartu dan server. Dalam memulai transaksi, pemegang kartu harus melakukan *Top Up* yang hanya dapat dilakukan jika pemegang kartu telah memiliki tabungan pada bank penerbit. Isi ulang (*Top Up*) bisa menggunakan mandiri debit yang dapat dilakukan melalui mandiri EDC, mandiri ATM tunai maupun non tunai, mandiri internet, dan mandiri sms, adapun syarat dan ketentuan kartu mandiri prabayar dari penerbit yaitu :

1. Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu hilang, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru.
2. Saldo yang terdapat dalam kartu tidak termasuk dalam program penjaminan lembaga penjamin simpanan (LPS).
3. Penggunaan kartu hanya dapat dilakukan sebatas saldo yang tersimpan pada kartu.
4. Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, mengcopy dan mengubah fisik maupun isi data kartu.

5. Pemegang kartu bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada penerbit apabila terjadi penggandaan (*Cloning*)¹¹ dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukan transaksi.
6. Dalam hal kartu hilang, penerbit tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik dan tidak akan mengembalikan saldo.
7. Dalam hal kartu rusak, penerbit tidak akan melakukan pemblokiran, tidak akan mengganti fisik kartu namun akan mengembalikan saldo.
8. Pencantuman nama, tanda tangan atau tanda-tanda apapun pada kartu bukan merupakan petunjuk atau bukti kepemilikan kartu.
9. Bank penerbit berhak secara sepihak menghentikan atau menanggihkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu atas dasar permasalahan teknis maupun non teknis.

Dengan melakukan pembelian kartu *E-Money* tersebut, maka pemegang kartu dianggap telah menyetujui seluruh isi dan persyaratan serta ketentuan penggunaan kartu tanpa perlu menandatangani. Namun kami dalam pihak penyedia jasa sudah menerapkan perlindungan kepada nasabah kami begitupun dalam hal pengguna uang elektronik, adapun perlindungan yang diberikan yakni :

1. Menggunakan perlindungan berbasis teknologi yang disebut “ *double do not*”
2. mengikuti regulasi perbankan, maksimal saldo dalam kartu maksimal Rp.2.000.000 rupiah.

¹¹ M.John Echols, *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.23

3. Tetap bertanggung jawab apabila kartu rusak, saldo tetap diberikan tetapi untuk penggantian kartu pihak dari bank mandiri tidak mengganti yang baru.

Kemudian selain itu juga perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, *No Conflict (Pre-Purchase)*, yaitu apabila tidak terdapat konflik atau tidak ada pertentangan, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *legislation*, dimana perlindungan hukum dilakukan dengan cara merancang dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. *Voluntary Self-Regulation*, dimana perlindungan konsumen dilakukan melalui cara perancangan dan penetapan peraturan oleh pelaku usaha sendiri secara sukarela (*voluntary*) didalam perusahaannya baik barang maupun jasa. Kedua, apabila terjadi *Conflict (Post-Purchase)*, apabila terjadi konflik atau pertentangan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka dapat diselesaikan melalui *litigation*, yaitu perlindungan hukum kepada konsumen yang terakhir adalah mengajukan perkara yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha ke pengadilan atau BPSK¹².

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Kota Makassar

Seiring dengan terjadinya Amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasca reformasi, tidak saja mengubah kedudukan dan fungsi lembaga Negara, tetapi juga melahirkan berbagai lembaga Negara pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bidang yudisial misalnya telah lahir Mahkamah Konstitusi

¹²Kurniawan, *Permasalahan Dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, H.162, di Akses Pada Tanggal 15 Juni 2019 14:24

sebagai lembaga Negara penyelenggara kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, selain itu lahir pula Komisi Yudisial sebagai *Supporting* organ dalam mendukung tugas dan fungsi penegakan hukum dengan tugas utama mengusulkan calon hakim agung dan menjaga harkat serta martabat hakim.

Lembaga-lembaga seperti yang dikemukakan diatas sangat diperlukan untuk mengakomodasi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Sebutlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan sentral untuk membantu pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Proses kerja BPSK mirip dengan pengadilan, karena itu BPSK juga disebut *Quasi* badan peradilan untuk menangani kasus-kasus konsumen.

Keberadaan BPSK sebagai *Quasi Judisial* dilatar belakangi oleh kondisi obyektif dalam aktivitas bisnis dari masa ke masa. Dalam aktivitas tersebut, selain melahirkan hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen berupa barang maupun jasa, juga tidak jarang dalam pola interaksi tersebut, terjadi kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam hubungan itulah, sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya dimana secara umum konsumen berada pada posisi tawar yang lemah dalam berhadapan dengan pelaku usaha ini salah satu faktor mengapa pelaksanaan perlindungan konsumen masih belum dapat terealisasi dengan baik karena meskipun sudah ada yang mengatur perihal peraturan-peraturan yang memberikan payung hukum terhadap konsumen namun dalam aplikasinya masih belum sesuai dengan aturan yang ada, akibatnya konsumen kerap menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha atau produsen yang secara sosial dan ekonomi memiliki

posisi yang kuat. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen sangat diperlukan campur tangan pemerintah atau negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.¹³

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 april 1999 dan telah berlaku secara efektif pada tanggal 20 april 2000. Lahirnya UUPK tersebut dilatarbelakangi oleh adanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung dengan kemajuan teknologi dan informatika dan dapat memperluas ruang gerak transportasi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara.

Sedangkan disisi lain kemajuan dan kesadaran konsumen masih rendah sehingga terjadi tidak keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Ketidak seimbangan dimaksud diperberat dengan masih rendahnya tingkat kesadaran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang perlindungan konsumen baik dalam memproduksi, memperdagangkan, maupun mengiklankan. Perlindungan konsumen pada hakekatnya adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, menurut dari Bapak Ivan selaku yang bertanggung jawab tentang kartu ATM, kartu debit, serta *E-Money* (uang elektronik) mengatakan bahwa masih sangat kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat sehingga uang elektronik ini masih asing ditelinga mereka, namun

¹³Saharuddin Damin, *Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, h.45, Di Akses Pada Tanggal 15 Juni 2018 15:00

kami yakin dua tahun yang akan datang masyarakat akan menggunakan dan akan terbiasa menggunakan yang namanya uang elektronik.¹⁴

Dalam rangka mengefektifkan pencapaian pemerintah dalam melindungi hak dari konsumen, beberapa peraturan serta lembaga untuk menindaklanjuti apabila ada pelaku usaha yang merugikan konsumen yaitu adanya lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan didukung beberapa peraturan :

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian.
5. Peraturan pemerintah no.58/2001 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
6. Peraturan menteri perdagangan no.20/M-DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang atau jasa.
7. Perma nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).¹⁵

Namun untuk lembaga BPSK ini masih belum banyak dari para konsumen mengetahui keberadaan dari lembaga ini, maka dari itu banyak konsumen yang merasa dirugikan namun hanya tinggal diam karena tidak mengetahui bahwa

¹⁴ Ivan Prasetyo, Penanggung Jawab Pertumbuhan Bisnis E-Channel, *Wawancara*, Makassar, 11 Juni 2019

¹⁵ Saharuddin damin, *Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, h.50-51, di akses pada tanggal 16 Juni 2018 14:00

adanya lembaga yang diperuntukkan untuk melindungi hak dari konsumen, ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi serta minimnya pengetahuan dari masyarakat.

Namun dikatakan oleh narasumber bahwasanya untuk masalah kartu *E-Money* (uang elektronik) pihaknya sudah memberikan perlindungan dengan maksimal demi kenyamanan dan kepuasan dari nasabah (konsumen) dari bank mandiri, beliau juga mengatakan bahwasanya uang elektronik ini maksimal saldo didalamnya itu hanya Rp.2.000.000,- bagi non register namun yang register saldo maksimal itu sebanyak Rp.5.000.000,- jadi ketika nasabah kehilangan kartu atau uang elektronik tersebut itu kerugiannya hanya maksimal saldo yang ada, itupun masih kategori kartu yang masih sangat baru, namun dari pihak kami (Bank Mandiri) apabila kartu hilang maka nasabah bisa datang ke bank untuk melaporkan kehilangan kartu dan secara langsung akan diberikan penggantian sebanyak saldo yang ada dikartu, akan tetapi masalah kartu tidak digantikan yang baru akan tetapi nasabah bisa kembali membeli kartu *E-Money* yang baru.¹⁶

Kemudian Bapak Ivan Prasetyo menanggapi masalah perlindungan yang kartu *E-Money* ini tanpa pengaman atau Password, Pak Ivan mengatakan bahwasanya : “kartu elektronik ini (*E-Money*) itu kami berdasarkan aturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia yang dimana Bank Indonesia menetapkan maksimum saldo yang ada dalam uang elektronik tersebut, karena uang elektronik ini semata-mata dikhususkan pada layanan-layanan publik yang membutuhkan proses cepat, contoh misalnya : pembayaran tiket kereta, belanja,

¹⁶Ivan Prasetyo, Penanggung Jawab Pertumbuhan Bisnis E-Channel, *Wawancara*, Makassar, 11 Juni 2019.

serta pembayaran di jalan tol, coba di bayangkan ketika uang elektronik ini diberikan password maka berapa lama orang yang dibelakang akan mengantri, berarti tujuan dari pembuatan uang elektronik ini yang berbasis teknologi tidak lagi efektif keberadaannya, jadi maka dari itu kenapa uang elektronik ini tidak memakai pengaman atau password itu dikarenakan karena ada layanan-layanan publik yang harus membutuhkan waktu yang cepat agar tidak ada lagi kemacetan serta antrian yang terlalu panjang dan lama dan aktivitas dari masyarakat pun terbantu dengan adanya uang elektronik ini. Kemudian yang kedua kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh para penyedia jasa dan masyarakat yang masih sangat kurang berpartisipasi dan familiar terhadap *E-Money* serta mencari tahu bagaimana cara proses kerja dari *E-Money*.

Bapak Ivan pun menerangkan bahwa pihaknya selalu mengadakan event-event yang bertema “*Car Free Day*” dimana event tersebut membuka bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana cara *Top Up*, serta penggunaan bagi uang elektronik, dan apapun itu yang terkait dengan kartu yang dikeluarkan oleh penyedia jasa, dan Bapak Ivan juga mengatakan akan lebih memperluas jaringan kerja sama sehingga lebih banyak lagi *Merchant-Merchant* yang dapat digunakan masyarakat dalam bertransaksi.

D. Persepsi Masyarakat Terhadap Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Kartu Elektronik di Kota Makassar

Jual-beli kartu *E-Money* jika melihat dari sudut pandang Islam secara garis besar menggunakan akad *Sharf* atau akad tukar menukar mata uang sebagai akad

utama. Selain akad *Sharf*¹⁷, produk ini juga didukung oleh akad lain yaitu akad jual beli biasa (*al-bay'*). Pengertian *ash-sharf* secara bahasa memiliki beberapa arti yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang atau disebut juga dengan *valas*, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan uang negara lain. Misalnya, rupiah dengan dolar dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'I, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Umar bin Khathab, Nabi saw., bersabda :“(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan dengan tunai”, dan juga hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Zib dan Zaid bin Arqam : “Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

Sharf menurut para fuqahah persyaratan (*requirement*) ketika hendak memberikan jasa jual-beli uang terdiri dari hal-hal berikut :

1. Nilai tukar yang diperjual belikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik) ataupun penguasaan secara yuridis.
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang tersebut berbeda.

¹⁷ Azhar Arsyad, *Kamus Bahasa Arab (Menguasai Kata Kerja Populer Dan Preposisi Bahasa Arab)*, Pustaka Pelajar, h.12

3. Dalam *sharf* tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak *khیار* syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual-beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual-beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual-beli itu, syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Hal ini ditujukan untuk menghindari riba.
4. Dalam akad *sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnyanya *sharf* penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan saat itu juga tidak boleh berhutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual-beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *sharf* tersebut tidak sah, karena terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad *sharf* yang saling dipertukarkan itu.

Secara singkat kesimpulannya dapat dikatakan bahwa suatu akad *sharf* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (1) harus tunai, (2) serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak dan (3) bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah kuantitas yang sama.

Berdasarkan syarat tersebut maka *e-money* termasuk kedalam akad *sharf* hal ini karena terlihat bahwa dalam pada kartu *e-money*, pembelian kartu, pengisian saldo, maupun pembayaran kepada *merchant* itu dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan pembayaran hal ini sesuai dengan syarat pertama.

Berikutnya adalah akad jual-beli biasa (*al-bay*) suatu jual beli dapat dikatakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara', pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Sighat (lafal ijab dan Kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, bahwasanya kartu elektronik (E-Money) termasuk dalam kegiatan jual beli, dan tidak termasuk dalam kategori riba ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Baqarah:2 (275)¹⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang berasal dari organisasi masyarakat yaitu "Muhammadiyah" atas nama Fatmawati yang memiliki jabatan Sekretaris Bidang Organisasi Sul-Sel, Ibu Fatma mengatakan bahwasanya dia sendiri adalah pengguna dari *E-Money* karena kebetulan dia juga sekaligus bendahara, dan menurut pandangan dari Ibu Fatma mengenai keberadaan uang elektronik ini :

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2017) h.178

“Inikan adalah bentuk dari perkembangan teknologi yang semakin canggih yang dulunya kalau kita lihat dizaman Rasulullah ketika melakukan jual-beli itu transaksinya masih sistem barter yang kemudian berkembang menjadi uang logam (koin-koin), kemudian berkembang lagi uang kertas, dan kemudian karena zaman semakin canggih maka diganti lah lagi dari kertas menjadi uang elektronik yang berbasis kartu kan gitu, jadi ketika tidak menyalahi syariat yang diterapkan oleh Islam yah sah-sah saja, karena kalau kita lihat dari sejauh ini bahwa keberadaan dari uang elektronik ini cukup membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari dari masyarakat. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya : belanja, pada pembayaran di tol, serta ketika kita ingin berpergian dengan menggunakan kendaraan umum seperti kereta api yah harus membutuhkan yang namanya uang elektronik karena dalam layanan publik itu harus gercap, tepat, dan cepat.”¹⁹

Kemudian Ibu Fatmawati mengatakan bahwasanya kalau kita lihat uang elektronik sekarang saya rasa itu tidak menyalahi rukun ataupun syarat dari jual-beli, terlebih dalam mekanisme pembeli kartu *E-Money* karena pertama yaitu orang yang berakad dalam hal ini penerbit sebagai penjual (*bai'*) dan pemegang atau pembeli (*musytari*), kemudian terkait obyek jual beli yang berupa fisik kartu *E-Money* ada dan dapat diketahui, dan alat tukarnya yaitu berupa uang rupiah, terkait dengan pembuatan kartunya, calon pemegang kartu harus berakal sehat, dewasa dan atas kemauan sendiri, kemudian beliau mengatakan bahwasanya didalam Islam dikenal doktrin tentang riba dan mengharamkannya. Islam tidak mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga terjadi perbedaan pendapat, beda pandangan dalam menilai persoalan ini akan berakibat timbul kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh tidaknya, halal haramnya, ada beberapa pendapat beberapa ulama dalam menentukan status hukum bermuamalah yaitu ada pendapat yang

¹⁹ Fatmawati, Sekretaris Bidang Muhammadiyah, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2019

mengharamkannya, pendapat yang mengharamkan bila bersifat konsumtif, dan tidak haram bila bersifat produktif, pendapat yang membolehkan, dan pendapat yang mengatakan syubhat. Namun masing-masing kelompok yang berbeda pendapat itu, semua merujuk kepada nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan riba :

أَثِمَ كَفَارٍ كُلِّ يُحِبُّ لَا وَاللَّهِ الصَّدَقَتِ وَيُرَبِّي الرَّبَّوَا اللَّهُ يَمَحَقُ ﴿٢٧٦﴾

Terjemahnya :

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (QS.Al-Baqarah:276)

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Terjemahnya :

“ Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr (sejenis gandum), syair dengan syair (sejenis bahan makan), kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama (timbangannya), serah terima ditempat (tangan dengan tangan). Barangsiapa menambah atau minta tambah maka dia terjatuh dalam riba, yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah sama”. (HR.Muslim)

Kemudian informan kedua yang merupakan pengguna dari kartu *e-money* ini yaitu atas nama Ibu Sukmawati yang mengatakan :

“keberadaan uang elektronik ini bagi saya sudah cukup nyaman bagi saya serta praktis dan memudahkan karena hanya cukup mengisi saldo dan sudah bisa menggunakan kartu tersebut, hanya saja masih sangat kurang tempat *top up* nya (pengisian ulang), serta saya rasa masalah kartu elektronik ini alangkah bagusnya agar supaya sosialisasinya diperbanyak agar masyarakat pun bisa menggunakan uang elektronik ini karena ini benar-benar sangat praktis dan sangat memudahkan dalam aktivitas sehari-hari.”²⁰

Kemudian informan ketiga yang merupakan pengguna dari kartu *e-money* ini yaitu atas nama Sriyani yang mengatakan :

“kebetulan saya dan suami saya ini menggunakan *e-money* ini sejak 2013, jadi selama saya menggunakan kartu ini baru satu kali kehilangan kartu, dan saldonya pun hilang yah meskipun tidak terlalu banyak saldonya, tapi kalau saya pribadi dalam menggunakan kartu ini saya rasa baik-baik saja dan nyaman-nyaman saja dalam bertransaksi karena lebih banyak manfaatnya yang saya rasa daripada kerugiannya.”²¹

Informan ketiga yang merupakan pengguna dari kartu *e-money* ini yaitu atas nama Muhammad Arfah :

“Sangat begitu terbantu dengan adanya uang elektronik ini, mungkin kalau saya pribadi peningkatan pengamanannya saja yang perlu ditingkatkan serta tempat pengisian ulangnya yang semakin luas, jadi dalam penggunaan kartu *e-money* ini benar-benar membawa keuntungan bukan hanya pada penyedia jasa tapi kepada kami juga konsumen-konsumen pengguna kartu *e-money* ini.”²²

Begitu pula dengan informan keempat-kesepuluh rata-rata mengatakan hal yang sama praktis dan nyaman serta memudahkan mereka dalam bertransaksi kata mereka “ kalau bisa yah sistem jaringannya yang perlu diperbaiki agar sekiranya tidak terjadi *error* dalam melakukan transaksi.

²⁰Sukmawati, Masyarakat Pengguna Kartu Elektronik, *Wawancara*, Makassar 21 Mei 2019

²¹Suryani, Masyarakat Pengguna Kartu Elektronik, *Wawancara*, Makassar 21 Mei 2019.

²²Arfah, Masyarakat Pengguna Kartu Elektronik, *Wawancara*, Makassar 21 Mei 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya :

1. Perlindungan konsumen yang diberikan bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran uang elektronik (*E-Money*) dilakukan dengan upaya hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia,. Bukan itu pula pihak dari penyedia jasa (Bank Mandiri) memberikan perlindungan kepada para konsumennya yaitu: Menggunakan perlindungan berbasis teknologi yang disebut “ *anti double do not*, mengikuti regulasi perbankan, maksimal saldo dalam kartu maksimal Rp.2.000.000 rupiah, dan tetap bertanggung jawab apabila kartu rusak, saldo tetap diberikan tetapi untuk penggantian kartu pihak dari bank mandiri tidak mengganti yang baru.
2. Adapun faktor penghambat dan pendukung dari terlaksananya perlindungan konsumen di Kota Makassar yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait sehingga banyak konsumen yang dirugikan dan dirampas haknya oleh para produsen yang hanya ingin mendapatkan keuntungan, kemudian faktor pendukungnya sudah banyak mengenai peraturan-peraturan yang terkait tentang perlindungan konsumen serta tersedianya jalur-jalur hukum atau biasa disebut jalur litigasi dan non litigasi dan dapat pula melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun *alternative*

3. penyelesaian sengketa dan ada lembaga yang disiapkan oleh pemerintah dalam menangani sengketa konsumen yaitu BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
4. Pandangan masyarakat tentang perlindungan konsumen bagi pengguna kartu elektronik (*e-money*) di Kota Makassar yaitu sudah cukup efektif karena manfaat dari kartu elektronik ini sudah dirasakan manfaatnya dan sangat terbantu akan keberadaan kartu elektronik tersebut karena selain praktis juga benar-benar memudahkan kegiatan-kegiatan masyarakat dalam beraktivitas hanya yang diinginkan para konsumen yaitu lebih terjaminnya kualitas serta keamanan ketika melakukan transaksi menggunakan kartu elektronik (E-Money) tersebut.

B. Implikasi

1. Bagi pemerintah dan pihak penyedia jasa sebaiknya lebih memperbaiki sistem penegakkan keadilannya dan memperbaiki atau meningkatkan sistem keamanan para konsumen tersebut melakukan transaksi, serta untuk lebih meningkatkan kontrol ataupun pengawasan terkait produsen atau pihak penyedia jasa yang apabila mengeluarkan produk baru serta memperketat system jalannya hukum yang adil bagi masyarakat yang benar-benar dirampas haknya dan dirugikan, serta pihak penyedia jasa lebih memperhatikan kualitas produknya agar tercapai kemashalatan bersama, pejabat pemerintah harus senantiasa berpegang teguh pada asas legalitas, sebagai prinsip yang fundamental dalam kehidupan masyarakat

2. Bagi masyarakat sebaiknya sebelum menggunakan uang yang berbasis elektronik ini agar sekiranya dapat mencari tahu terkait kartu elektronik tersebut agar pada saat pemakaian atau digunakan itu dapat memberikan dampak positif kepada diri sendiri dan orang lain sehingga kenyamanan dalam menggunakan kartu tersebut bisa dirasakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ali Hasan.M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ali Zainuddin, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*. Jakarta: BI, 2006.
- Candrawati, Nii Nyoman Anita, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*” . mahasiswa magister ilmu hukum universitas udayana.
- Dunil Z, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dewi, Eli Waria, *Hukum Perlindungan Konsumen*; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Edwin Nasution, Mustafa, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Hidayat, Ahmad, dkk, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*. Jakarta: Grand desain upaya peningkatan penggunaan pembayaran non tunai, 2006.
- Ivan Fernandus Halawa, *Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik Yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik*, Medan, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Johanes Ibrahim, *Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24 No.1 Tahun 2005.
- Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*, Malang, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Marilang, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, Alauddin University Press, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2008.

Mintarsih. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Uu.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Jurnal Wawasan Hukum, vol.29.

Rachbini, didik j dan Suwidi Tono dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta: PT. Mardi Mulyo, 2000.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet. III: Jakarta, 2016.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Kharisma putra utama, 2016.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen edisi revisi*, Jakarta: PT. Kharisma putra utama, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik

Ash-sharf: *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*.

Kamus

Arsyad Azhar, *Kamus Bahasa Arab (Menguasai Kata Kerja Populer Dan Preposisi Bahasa Arab)*, Pustaka Pelajar.

Echols John M, *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

1. Pedoman wawancara

- a. Pertama, menanyakan mengenai identitas dari informan secara lengkap.
- b. Kemudian yang kedua, menanyakan pendapatnya mengenai keberadaan dari kartu elektronik di zaman modern ini.
- c. menanyakan apakah si informan ini salah satu pengguna kartu elektronik sebagai alat untuk melakukan transaksi.
- d. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang keberadaan kartu elektronik di zaman modern ini ?
- e. Apa kelemahan dan keunggulan dari kartu elektronik ini dibandingkan alat transaksi yang manual ?
- f. Apakah ibu/bapak ini pernah mengalami masalah pada kartu elektroniknya pada saat melakukan transaksi?
- g. Bagaimana tindakan pemerintah kepada pelaku usaha dalam melakukan perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa kartu elektronik ini ?
- h. Sejauh ini bagaimana perbandingan pengaturan antara kartu elektronik ini dengan alat transaksi manual yang bapak/ibu rasakan selama menggunakannya?
- i. Seiring dengan dicanangkannya kepada masyarakat Indonesia untuk beralih ke kartu elektronik ini (e-money), bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal adanya timbal balik yang memberikan keuntungan bukan hanya penerbit tetapi juga pada masyarakat ?

2. Komposisi Bab

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
- C. Rumusan Masalah
- D. Kajian Pustaka
- E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN TEORITIS

- A. Pengertian Konsumen
- B. Sejarah Perlindungan Konsumen
- C. Hak dan Kewajiban Konsumen
- D. Konsep Uang
- E. Upaya Hukum Bagi Pemegang Kartu Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Uang Elektronik
- F. Teori Maqasid Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Lokasi Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Instrument Penelitian
- F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- G. Pengujian dan Keabsahan Data

BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU ELEKTRONIK DIKOTA MAKASSAR

- A. Setting Lokasi Penelitian
- B. Bentuk Perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu elektronik di kota makassar
- C. Faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen di kota makassar
- D. Persepsi masyarakat terhadap perlindungan konsumen bagi pengguna kartu elektronik dikota makassar

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap NUR AMIRA AZIS, lahir di Pangkajene pada tanggal 14 Agustus 1997, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan ABD.AZIS, DAUN dan JAMILA S,Pd

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SDN 35 Tekolabbua pada tahun 2003, Kemudian penulis menempuh pendidikan di SMPN 2 Pangkajene ditahun 2009, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pangkajene ditahun 2012, dan ditahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar melalui jalur SNMPTN dan Lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara.

